

Fiscal Independence Analysis Based On Regional Income Structure Of Regency And City Of Central Java Province

Analisis Kemandirian Fiskal Berdasarkan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah

Shofiah Indriawati^{1*}, Maulidyah Indira Hasmarini²

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia^{1,2}

b300220077@student.ums.ac.id^{1*}, mi148@ums.ac.id²

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of fiscal independence of district and city governments in Central Java Province during the 2019–2023 period by reviewing the regional revenue structure consisting of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Revenues. The data used are panel data from 35 districts/cities in Central Java, and the analysis was conducted using a panel data regression method with a Fixed Effect Model (FEM) approach through EViews 12.0 software. The results show that PAD has a positive and significant effect on fiscal independence, while Balancing Funds and Other Legitimate Regional Revenues have a negative and significant effect. These findings indicate that increasing PAD will encourage fiscal independence, but dependence on transfer funds from the central government actually reduces regional fiscal capacity. Overall, the regional revenue structure in Central Java is still unbalanced because PAD contributions have not become the main source of financing. Therefore, increasing the effectiveness of PAD management and optimization is needed to strengthen regional fiscal capacity.

Keywords : *Fiscal Independence, Local Own-Source Revenue, Balance Funds, Other Legitimate Revenue.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023 dengan meninjau struktur pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Data yang digunakan merupakan data panel dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dan analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) melalui perangkat lunak EViews 12.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD akan mendorong kemandirian fiskal, namun ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat justru menurunkan kemampuan fiskal daerah. Secara keseluruhan, struktur pendapatan daerah di Jawa Tengah masih belum seimbang karena kontribusi PAD belum menjadi sumber utama pembiayaan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi PAD diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah (Nurrahmadani et al., 2024). Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal di banyak daerah belum sepenuhnya tercapai (Kusuma & Anwar, 2024). Desentralisasi fiskal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berperan penting dalam memperkuat kemandirian daerah melalui

efisiensi alokasi anggaran (Christia & Ispriyarso, 2019). Teori Oates (1972) menegaskan bahwa desentralisasi meningkatkan efisiensi distribusi sumber daya karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan lokal, sementara Musgrave (1959) menyatakan bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam fiskal sebagian dialihkan ke daerah. Dalam konteks ini, kemampuan fiskal menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi (Surgawati, 2022). Provinsi Jawa Tengah dengan 35 kabupaten/kota menunjukkan dinamika fiskal yang menarik, di mana sebagian besar daerah belum mencapai kemandirian fiskal optimal; hanya Kota Semarang yang tergolong mandiri secara fiskal dengan rasio di atas 100%, sementara rata-rata PAD daerah lain hanya sekitar 36,74% dari total pendapatan dan ketergantungan terhadap transfer pusat mencapai lebih dari 61% (Ingriyani et al., 2024; BPS, 2024). Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Jawa Tengah selama 2019–2023 berkisar antara 0,54 hingga 0,68, menandakan tingkat kemandirian sedang namun belum stabil, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan fiskal di wilayah tersebut.

Permasalahan pokok yang dihadapi terletak pada struktur penerimaan daerah yang belum seimbang dan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia & Haryanto (2019) serta Ardinugroho et al. (2021) telah meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta belanja modal terhadap kemandirian fiskal. Namun, kajian tersebut belum menyoroti secara spesifik struktur pendapatan daerah sebagai faktor determinan utama kemandirian fiskal. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara longitudinal dan komparatif memetakan variasi tingkat kemandirian fiskal antar kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan komposisi pendapatan selama periode 2019–2024.

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya analisis mendalam terhadap bagaimana komposisi struktur penerimaan daerah, yang meliputi PAD, Dana Perimbangan, serta Pendapatan Sah Lainnya, berpengaruh terhadap tingkat kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan desentralisasi, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan ketimpangan pembangunan (Haptari et al., 2022). Pemahaman yang komprehensif mengenai struktur penerimaan daerah akan memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan fiskal yang lebih efisien, termasuk dalam hal reformasi pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, serta peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (Laoli et al., 2022).

Penelitian ini semakin penting dilakukan mengingat adanya tren peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir, yang belum diikuti dengan peningkatan signifikan pada tingkat kemandirian fiskal di sebagian besar wilayah. Ketimpangan antar daerah juga masih cukup mencolok. Menurut Christia dan Ispriyarso (2019), perbedaan kapasitas fiskal antara kabupaten dan kota berdampak besar terhadap efektivitas perencanaan pembangunan. Sementara itu, temuan Aithan et al. (2025) mengindikasikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal justru berpengaruh negatif. Kondisi ini menegaskan bahwa keseimbangan serta kualitas struktur penerimaan dan pengeluaran daerah merupakan faktor krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat kemandirian fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023 berdasarkan komposisi pendapatan daerah, khususnya PAD, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat kemandirian fiskal serta memetakan pola dan kesenjangan fiskal yang muncul. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang desentralisasi fiskal di negara berkembang, sedangkan secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan dalam evaluasi kebijakan fiskal serta strategi peningkatan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah.

2. Tinjauan Pustaka

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan konsep yang menekankan pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Buchanan & Musgrave dalam Hasanli, 2017). Tujuan utamanya adalah memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas fiskal sesuai dengan kebutuhan lokal (Nany et al., 2022). Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian kekuasaan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya kemandirian fiskal daerah, yang tercermin dari kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat.

Kemandirian Fiskal

Tingkat kemandirian fiskal daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan dan menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Zakiah, 2022). Indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks dengan rentang nilai antara 0 hingga 100, di mana nilai rendah menunjukkan ketergantungan penuh terhadap pemerintah pusat, sedangkan nilai tinggi menandakan kemampuan daerah membiayai pengeluarannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks hubungan pusat-daerah, indeks yang rendah menggambarkan pola hubungan instruktif di mana peran pusat lebih dominan, sedangkan indeks tinggi mencerminkan hubungan delegatif yang menandakan adanya otonomi fiskal dan kapasitas pengelolaan keuangan yang lebih kuat di tingkat daerah (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023).

Keuangan Daerah dan Struktur Pendapatan

Keuangan daerah mencakup keseluruhan sistem, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan serta belanja daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, pinjaman, serta pendapatan sah lainnya (Wibowo & Oktivalerina, 2022). PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Menurut Hafandi & Romandhon (2020), PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ketika PAD tidak mencukupi, pemerintah daerah memperoleh dukungan dari Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (Saraswati & Nurharjanti, 2021; Risdiyanto et al., 2023). Selain itu, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi bagian penting struktur pendapatan, mencakup hibah, dana darurat, dan sumber lain yang ditetapkan pemerintah pusat (Nurdiwaty et al., 2017). Meskipun porsi relatif kecil, komponen ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam pembiayaan daerah, terutama saat terjadi defisit atau kebutuhan mendesak.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah data panel, yaitu sebuah kombinasi antara data cross section dengan time series. Sumber data yang digunakan data sekunder (Digdowiseiso & Satrio, 2022). Model yang terpilih dari hasil kedua uji tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan merupakan data *time-*

series tahun 2019 – 2023 dan data *cross-section* dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) *Eviews 12.0*. Adapun bentuk model ekonometriknya yang diimplementasikan adalah sebagai berikut :

$$IKF_{it} = \alpha + \beta_1 \log PAD_{it} + \beta_2 \log DP_{it} + \beta_3 \log LPADS_{it} + \varepsilon_t$$

Di mana :

- IKF : Indeks Kemandirian Fiskal (Persen)
 PAD : Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)
 DP : Dana Perimbangan (Ribuan Rupiah)
 LPADS : Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Ribuan >Rupiah)
 α : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien variabel independen
 i : Data time series
 t : Data cross section
 ε : Residual/error

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh berbagai faktor terhadap tingkat kemandirian fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa data kuantitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan serta data kemandirian fiskal pada masing-masing daerah di provinsi tersebut. Seluruh data sekunder dikumpulkan melalui sumber resmi, antara lain portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, serta berbagai sumber pendukung lainnya seperti situs web pemerintah, jurnal ilmiah, dan literatur relevan.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil estimasi model ekonometrik yang diperoleh dengan pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Estimasi Model

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	0,2424	-0,1391	0,1962
LogPAD	0,1667	0,1389	0,1523
LogDP	-0,1471	-0,1025	-0,1309
LogLPADS	-0,0130	-0,0134	-0,0135
R ²	0,9479	0,9815	0,9118
Adj. R ²	0,9470	0,9765	0,9103
F-statistic	1037,783	196,720	589,686
Prob. F-statistic	0,000	0,0000	0,0000
Uji Pemilihan Model			
Chow			
Cross-section F (34,137) = 7,326; Prob. F(34,137) = 0,0000			
Hausman			
Cross-section random χ^2 (3) = 29,925; Prob. χ^2 = 0,0000			

Uji Chow dan *Uji Hausman* memperlihatkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih sebagai model estimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik F dan statistik χ^2 yang keduanya memiliki nilai 0,0000 (<0,01) hasil estimasi lengkap dari model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM), tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi FEM

$IKF_{it} = -0,1391 + 0,1389\log PAD_{it} - 0,1025\log DP_{it} - 0,0134\log LPADS_{it}$
(0,0000)* (0,0000)* (0,0000)*
$R^2 = 0,9815; DW = 2,4908; F = 589,686; Prob. F = 0,000$

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$. Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM) eksis dengan probabilitas F bernilai 0,000 ($<0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9815, menunjukkan model terestimasi *Fixed Effect Model* (FEM) memiliki tingkat estimasi yang cukup tinggi, yakni 98,15% variabel IKF dapat dipengaruhi oleh variabel PAD, DP, dan LPADS, sisanya sebesar 1,85% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	t-statistik	Prob. t-stat	Kriteria	Kesimpulan
LogPAD	25,0230	0,0000	$<0,01$	Signifikan pada $\alpha = 1\%$
LogDP	-9,7454	0,0000	$<0,01$	Signifikan pada $\alpha = 1\%$
LogLPADS	-15,3031	0,0000	$<0,01$	Signifikan pada $\alpha = 1\%$

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal dengan nilai probabilitas t masing-masing sebesar 0,0000 ($<0,01$). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan dengan koefisien regresi 0,1389, yang berarti setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal sebesar 0,1389%, dan sebaliknya penurunan PAD 1% akan menurunkan indeks sebesar 0,1389%. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD berperan penting dalam memperkuat kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

Sebaliknya, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal dengan koefisien regresi masing-masing -0,1025 dan -0,0134. Artinya, setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1% menurunkan tingkat kemandirian fiskal sebesar 0,1025%, sementara kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1% menurunkannya sebesar 0,0134%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat maupun pendapatan non-PAD cenderung mengurangi kapasitas kemandirian fiskal daerah, menegaskan pentingnya penguatan basis penerimaan asli daerah sebagai sumber pembiayaan utama.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, ditemukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan pada dana transfer dari pusat. Sebaliknya, rendahnya PAD mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah akan memperkuat kemampuan keuangan daerah. Secara teoritis, hasil ini mendukung pandangan Musgrave (1959) dan Oates (1972) yang menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal melalui sumber lokal dapat memperkuat efisiensi alokasi sumber daya dan memperluas ruang otonomi fiskal pemerintah daerah.

Secara empiris, temuan ini selaras dengan penelitian Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, dan Ayu Larasati (2020) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dan kemandirian fiskal. Dari sisi praktis, hasil penelitian menegaskan pentingnya

strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi basis pajak daerah, penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya tersebut tidak hanya akan mendorong peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian fiskal yang berkelanjutan di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Hasil penelitian pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Artinya, semakin besar porsi Dana Perimbangan yang diterima suatu daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian fiskalnya. Sebaliknya, ketika ketergantungan terhadap dana tersebut menurun, kemampuan daerah untuk mandiri secara fiskal justru meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan, sehingga ruang fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Ardinugroho et al. (2021) yang menemukan bahwa peningkatan Dana Perimbangan dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal karena menimbulkan ketergantungan fiskal (*fiscal dependency*) terhadap pemerintah pusat. Dengan kata lain, meskipun Dana Perimbangan berfungsi sebagai instrumen untuk membantu daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, keberlanjutan ketergantungan terhadap dana tersebut dapat menghambat kemandirian fiskal jangka panjang. Dalam konteks ini, Dana Perimbangan dapat dipandang sebagai bantuan eksternal yang bersifat sementara untuk menutup defisit, bukan sebagai sumber utama pembiayaan daerah yang berkelanjutan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Berdasarkan hasil penelitian pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, ditemukan bahwa variabel *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan dari komponen tersebut tidak selalu mencerminkan bertambahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sumber pendapatan tersebut bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, seperti hibah, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan insidental lainnya yang tidak berasal dari aktivitas ekonomi lokal. Meskipun dapat menambah kas daerah dalam jangka pendek, jenis pendapatan ini tidak berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal otonom sebagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, peningkatan pada pos *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah* justru cenderung memperbesar ketergantungan fiskal daerah terhadap pihak eksternal. Hasil ini sejalan dengan temuan Wibowo dan Oktivalerina (2022) yang menyatakan bahwa kontribusi komponen tersebut terhadap kemandirian fiskal relatif rendah karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak stabil. Secara praktis, pemerintah daerah perlu merumuskan ulang strategi optimalisasi pendapatan non-reguler dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan hibah, memperluas kemitraan dengan sektor swasta, serta memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. Dengan pendekatan tersebut, *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah* diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber penerimaan yang produktif dan berkelanjutan, bukan sekadar penambah kas bersifat sementara, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat tercapai secara lebih stabil.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, diperoleh temuan bahwa komponen utama pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian fiskal. Secara spesifik, PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan, menandakan bahwa peningkatan PAD berkontribusi langsung terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri. Sebaliknya, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian fiskal, yang mengindikasikan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun penerimaan daerah meningkat, struktur pendapatan belum menunjukkan keseimbangan yang ideal, sehingga tujuan utama desentralisasi fiskal dalam mewujudkan kemandirian fiskal belum sepenuhnya tercapai.

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah disarankan untuk memperkuat kemandirian fiskalnya melalui peningkatan kontribusi PAD. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, memperbaiki tata kelola aset daerah, serta meningkatkan kinerja dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, ketergantungan terhadap Dana Perimbangan perlu ditekan dengan memaksimalkan penggunaan transfer pusat secara produktif dan diarahkan pada pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu mengelola komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPADS) secara transparan, akuntabel, dan terencana agar mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal tanpa menimbulkan ketergantungan baru terhadap pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Aithan, I., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Jurnal Ekonomi Dan Administrasi Modern ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN APBD TAHUN 2024 *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*. 9(2), 8–21.
- Amalia, A. F. N., & Haryanto. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2017. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Ardinugroho, D., Soesilo, A. M., & Mulyanto, M. (2021). The effect of regional original income, balanced funds and regional expenditures on regional financial independence (Case study in Central Java Province 2014–2018). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI) Journal*. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I2.2091>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Digdowniseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Digdowniseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandiriann Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1170–1181. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1167>
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis of Factors Affecting Regional Financial Independence in the Framework of a Policy Strategy For Increasing Regional Original Income. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(4), 777–796. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.412>
- Hasanli, A. (2017). Fiscal decentralization and economic growth: A dilemma between theory and empiricism. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 20(3), 77–94. <https://doi.org/10.5782/2223-2621.2017.20.3.77>
- Ingriyani, D., Armeliza, D., & Musyaffi, A. M. (2024). Analysis of the level of regional independence in regencies and cities in Central Java Province for 2019–2022. *ISC-BEAM*. <https://doi.org/10.21009/isc-beam.011.14>
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2024). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2). <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art14>
- Laoli, M., Ndraha, A., Telaumbanua, Y., & Indah Laoli Ayler Ndraha Yasminar Telaumbanua, M. B. (2022). Implementasi Sipd Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi Kasus Bpkpd Sebagai Leading Sektor Penganggaran) Sipd Implementation in Regional Financial Management in Nias District (Case Study of Bpkpd As the Leading Budgeting Se. *Emba*, 10(4), 1381–1389.
- Mohammad Wasil, Nika Syahdila Putri, Ayu Larasati, N. M. (2020). Journal of Regional Economics Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 1–15.
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(3), 247–261. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/download/8274/4938>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- Nurrahmadani, S., Hariyati, & Armiani. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Valid Jurnal Ilmiah*, 21(1), 162–179. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757%0Ahttp://dx>
- Risdiyanto, E., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1813–1822. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4851>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Surgawati, I. (2022). Analisis derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Indonesia menjelang 20 tahun otonomi daerah. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*.

<https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566>

Tengah, B. P. S. P. J. (2024). *Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2019–2023*. BPS Provinsi Jawa Tengah.

Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>

Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 364–378. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>